

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Masa pergerakan nasional merupakan fase penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang menandai kebangkitan kesadaran kolektif untuk bersatu dan menentang penindasan kolonial Belanda. Sartono Kartodirdjo menyebut periode ini sebagai “Kebangunan Nasional”, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia. Pergerakan nasional tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil proses panjang yang dipengaruhi oleh penderitaan rakyat, rasa senasib-sepenanggungan, serta tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri (Ahmadi, 2017).

Salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan tersebut adalah diterapkannya kebijakan Politik Etis yang diumumkan Ratu Wihelmina pada 1901 atas gagasan Conrad Theodor van Deventer. Pada tahun 1899, ia menerbitkan sebuah artikel berjudul *Een eerescheduld* (hutang kehormatan), yang menyatakan bahwa Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperoleh dari sumber daya Indonesia. Kebijakan balas budi tersebut kemudian diwujudkan melalui program *Trias van Deventer* (edukasi, irigasi, emigrasi) (Ricklefs, 2001) yang membuka akses pendidikan bagi kaum priyayi dan melahirkan golongan terpelajar yang kemudian menjadi pelopor organisasi pergerakan nasional.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Hindia Belanda merupakan wilayah yang majemuk dan ditinggali oleh berbagai kelompok etnis, namun sistem kolonial membentuk hierarki sosial yang diskriminatif. Dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1854, penduduk dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *Europeanen* (Eropa), *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing: Tionghoa, Arab, India), dan *Inlanders* (Pribumi) (Aziz, 2025). Sistem ini menciptakan segregasi rasial dan ketimpangan hukum, di mana Pribumi dan Timur Asing hanya berstatus “*Nederlandsch Onderdaan*” tanpa

hak politik penuh. Dalam struktur tersebut, etnis Tionghoa menempati posisi sosial yang unik. Mereka tidak termasuk golongan Pribumi, tetapi juga tidak memperoleh kedudukan yang setara dengan orang Eropa. Sebagai bagian dari *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing), masyarakat Tionghoa berada pada posisi “minoritas perantara”; di satu sisi mereka memiliki akses ekonomi relatif lebih luas dalam aktivitas perdagangan dan ekonomi, tetapi di sisi lain tetap mengalami berbagai pembatasan dalam bidang politik, hukum, maupun pendidikan.

Posisi tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan kolonial yang telah berlangsung sejak masa VOC. Setelah peristiwa Geger Pecinan tahun 1740, pemerintah VOC mewajibkan masyarakat Tionghoa tinggal di kawasan khusus di luar tembok Kota Batavia, yaitu *Diestpoort* yang kemudian dikenal sebagai Glodok atau Pecinan. Kebijakan pemukiman tersebut menjadi cikal bakal penerapan *wijkenstelsel*, yakni sistem pemisahan permukiman berdasarkan etnis yang masih dipertahankan oleh pemerintah kolonial hingga awal abad ke-20. Bersamaan dengan itu, diberlakukan pula *passenstelsel* yang mewajibkan masyarakat Tionghoa memperoleh surat izin resmi apabila hendak bepergian ke luar wilayah tempat tinggalnya. Kedua kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa kontrol kolonial terhadap komunitas Tionghoa tidak hanya dilakukan melalui aspek hukum, tetapi juga melalui pengaturan ruang hidup dan mobilitas mereka (Lohanda, 1996).

Berbagai bentuk diskriminasi tersebut memperkuat segregasi rasial di Hindia Belanda serta membatasi ruang gerak politik masyarakat Tionghoa. Meskipun Politik Etis bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat jajahan, sebagian kalangan Tionghoa memandang bahwa kebijakan tersebut lebih banyak memberikan perhatian kepada penduduk bumiputera dibandingkan kepada mereka. Penilaian tersebut muncul karena berbagai kebijakan kolonial dinilai tidak memberikan perubahan terhadap berbagai pembatasan hukum dan sosial yang selama ini mereka alami tidak mengalami perubahan yang berarti (Suryadinata, 1999). Akibatnya, masyarakat

Tionghoa mulai merasakan perlunya memperjuangkan kedudukan dan kepentingan politik mereka sendiri.

Pada saat yang sama, kebijakan Politik Etis secara tidak langsung memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berkembangnya pendidikan, organisasi, dan pers di Hindia Belanda. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh komunitas Tionghoa untuk mendirikan sekolah, organisasi, dan surat kabar sebagai sarana penyebaran gagasan. Namun demikian, berkembangnya kesadaran politik masyarakat Tionghoa tidak semata-mata disebabkan oleh Politik Etis. Kebangkitan nasionalisme di daratan Tiongkok, terutama setelah Revolusi Xinhai 1911, berkembangnya gerakan Pan-Tionghoa, serta pengalaman diskriminasi yang mereka alami di Hindia Belanda turut memberikan pengaruh yang besar terhadap munculnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Tionghoa perantauan.

Tonggak penting berkembangnya kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan etnis Tionghoa ditandai didirikannya *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) pada 17 Maret 1900 oleh kalangan Tionghoa yang memperoleh pendidikan Barat. Organisasi ini menjadi wadah pembaruan sosial dan pendidikan masyarakat Tionghoa sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya persamaan hak dengan golongan Eropa. Ong Hok Ham menjelaskan bahwa nasionalisme Tionghoa pada masa awal bersifat eksklusif karena lebih menekankan kepentingan kelompok Tionghoa sendiri, meskipun memiliki sikap yang menentang kebijakan pemerintah kolonial (Darini, 2008). Selain itu, berkembangnya nasionalisme Tiongkok melalui gagasan Pan-Asia semakin memperkuat semangat kebangsaan dengan menyerukan persatuan bangsa-bangsa Asia dalam menghadapi dominasi kolonial Barat.

Dalam situasi tersebut, kebutuhan masyarakat Tionghoa akan sebuah ruang untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan politiknya semakin meningkat. Salah satu media yang kemudian memainkan peranan penting adalah pers. Melalui pers, masyarakat Tionghoa tidak hanya memperoleh sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang untuk membangun identitas kolektif, menyampaikan kritik terhadap pemerintah

kolonial, serta memperdebatkan berbagai gagasan mengenai masa depan komunitas Tionghoa di Hindia Belanda.

Perkembangan pers di Hindia Belanda berlangsung seiring dengan meningkatnya kehidupan sosial dan politik masyarakat pada awal abad ke-20. Secara umum, pers di Hindia Belanda dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pers Eropa, pers Tionghoa, dan pers Indonesia. Ketiga pers tersebut memiliki sejarahnya tersendiri. Pers Eropa merupakan pers yang paling awal berkembang, kemudian diikuti oleh pers Tionghoa dan pers Indonesia. Pada masa awal perkembangannya, pers Tionghoa maupun pers Indonesia masih banyak dipimpin oleh orang-orang (Indo) Eropa. Bahkan, wartawan-wartawan Tionghoa dan Indonesia generasi pertama juga memperoleh pengalaman jurnalistik dari kalangan tersebut (Maters, 2003). Seiring berkembangnya pendidikan dan meningkatnya kesadaran politik, masyarakat Tionghoa mulai mendirikan dan mengelola media cetaknya sendiri sebagai sarana penyampaian aspirasi serta penyebaran gagasan.

Pada awal abad ke-20 mulai bermunculan media pers yang didirikan oleh kalangan Tionghoa di Hindia Belanda. Lahirnya pers tersebut ditandai dengan munculnya surat kabar *Li Po* (1901) di Sukabumi, yang kemudian disusul oleh surat kabar *Perniagaan*, *Warna Warta*, *Pewarta Soerabaja*, *Ik Po*, *Sin Po*, *Keng Po*, *Sin Tit Po*, dan lain sebagainya. Pers Indonesia-Tionghoa diterbitkan dalam dua jenis bahasa, yaitu bahasa Melayu yang umumnya digunakan oleh kalangan Tionghoa *peranakan* dan bahasa Tionghoa yang digunakan oleh kalangan Tionghoa *totok*. Perbedaan bahasa tersebut tidak hanya mencerminkan latar belakang sosial pembacanya, tetapi juga berpengaruh terhadap arah penyebaran gagasan politik yang berkembang di kalangan masyarakat Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, pers Tionghoa turut memperkaya dinamika politik pada masa pergerakan nasional.

Kelahiran pers Tionghoa berlangsung beriringan dengan tumbuhnya kesadaran politik masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda. Dalam kondisi sosial yang masih dibatasi oleh berbagai kebijakan kolonial, pers menjadi

sarana untuk mengekspresikan identitas, memperjuangkan kepentingan politik, serta menyampaikan kritik terhadap pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pers Tionghoa tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan kesadaran politik masyarakat Tionghoa pada masa pergerakan nasional.

Pada awal perkembangannya, pers Tionghoa pada umumnya masih berorientasi kepada Tiongkok sebagai dampak dari bangkitnya nasionalisme Tiongkok pada awal abad ke-20. Namun, memasuki akhir dekade 1920-an hingga 1930-an, orientasi politik pers Tionghoa di Hindia Belanda berkembang semakin beragam. Secara umum terdapat tiga kecenderungan utama, yaitu pers yang berorientasi kepada Tiongkok, pers yang berorientasi kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan pers yang berorientasi kepada Indonesia.

Pengelompokan tersebut, tidak berarti bahwa sejak awal berdirinya setiap surat kabar telah memiliki orientasi yang tetap. Kecenderungan politik dan sosial yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan orientasi yang berkembang di dalamnya. Namun demikian, orientasi politik pers Tionghoa mengalami perubahan mengikuti dinamika organisasi, kepemimpinan redaksi, serta perkembangan politik pada masa pergerakan nasional. Oleh karena itu, pengelompokan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kecenderungan orientasi politik yang dominan pada periode tertentu, bukan sebagai kategori yang bersifat permanen.

Surat kabar *Sin Po* merupakan salah satu media yang menunjukkan kecenderungan nasionalisme Tiongkok di kalangan Tionghoa *peranakan*. Melalui pemberitaannya, *Sin Po* banyak menyuarakan pandangan tentang identitas ke-Tionghoa-an, status kewarganegaraan, serta sikap politik mereka di bawah pemerintah kolonial. Meskipun demikian, orientasi tersebut tidak membuat *Sin Po* sepenuhnya menutup diri terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda. Dalam berbagai pemberitaannya, surat kabar ini juga memuat informasi mengenai pergerakan politik bumiputera dan menjalin relasi dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Salah satu kontribusi penting

Sin Po pada masa pergerakan nasional ialah menjadi media pertama yang menampilkan lagu “Indonesia Raya” karya W.R. Supratman pada halamannya (Kosasih, 2013). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi nasionalisme Tiongkok yang dianut *Sin Po* tidak sepenuhnya menghalangi keterlibatannya dalam perkembangan nasionalisme Indonesia.

Berbeda halnya dengan *Sin Po*, surat kabar *Perniagaan*, yang kemudian berganti nama menjadi *Siang Po* pada tahun 1930, menunjukkan perkembangan orientasi politik yang berbeda. Surat kabar ini didirikan oleh kalangan opsir Tionghoa yang berpikiran kolot dan tidak sejalan dengan aliran revolusioner Dr. Sun Yat Sen. Pada masa awal penerbitannya, surat kabar ini belum menunjukkan keberpihakan politik yang tegas (Suryadinata, 2010) sebagaimana *Sin Po* atau *Sin Tit Po*. Akan tetapi, setelah berganti nama menjadi *Siang Po*, orientasinya semakin jelas mendukung pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perubahan tersebut berkaitan dengan keterlibatan tokoh-tokoh *Chung Hwa Hui* (CHH),¹ terutama setelah surat kabar ini dipimpin oleh Phoa Liong Gie, yang juga merupakan anggota *Volksraad* sekaligus pemimpin organisasi Tionghoa *Chung Hwa Hui* (CHH) (Suryadinata, 2010). Oleh karena itu, dalam penelitian ini *Siang Po* dikategorikan sebagai pers yang berorientasi kepada pemerintah kolonial, sedangkan *Perniagaan* dipahami sebagai surat kabar yang mengalami perubahan orientasi politik secara bertahap.

Di sisi lain, pada dekade 1930-an berkembang surat kabar *Sin Tit Po* yang menunjukkan kecenderungannya dengan gagasan nasionalisme Indonesia. Di bawah kepemimpinan Liem Koen Hian, *Sin Tit Po* secara konsisten memuat berita dan opini yang mendukung pergerakan nasional serta mengkritik kolonialisme Belanda. Melalui media ini, gagasan *Indonesierschap*, yaitu kesadaran bahwa Tionghoa *peranakan* merupakan bagian dari bangsa Indonesia secara politik, semakin disebarluaskan.

¹ Chung Hwa Hui merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan kaum Tionghoa di Hindia Belanda melalui jalur politik yang lebih dekat dengan struktur pemerintahan kolonial (Andayani & Kumalasari, 2017).

Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan berdirinya Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tanggal 25 September 1932. Sejak awal pendiriannya, PTI bertujuan untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik serta turut mewujudkan Indonesia menjadi satu negara yang utuh, di mana semua rakyat, termasuk etnis Tionghoa, memiliki hak serta kewajiban yang setara (Suryadinata, 2010).

Munculnya tiga kecenderungan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pers Tionghoa bukanlah kelompok yang homogen. Perbedaan orientasi politik masing-masing surat kabar melahirkan berbagai perdebatan mengenai identitas politik, kewarganegaraan, dan arah perjuangan masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda. Dengan demikian, pers tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi arena kontestasi berbagai gagasan politik yang berkembang pada masa pergerakan nasional.

Perbedaan orientasi politik tersebut kemudian tampak dalam berbagai polemik antarsurat kabar Tionghoa. Salah satu contohnya ialah kritik yang disampaikan *Sin Tit Po* terhadap kelompok elite Tionghoa yang tergabung dalam *Chung Hwa Hui* (CHH). Kelompok ini dinilai tidak bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan cenderung bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Melalui pemberitaannya, *Sin Tit Po* secara konsisten memuat berita dan tulisan mengenai aktivitas politik kaum bumiputera serta menyuarakan dukungan terhadap pergerakan nasional hingga tahun 1942.

Sikap tersebut membuat *Sin Tit Po* memperoleh sambutan luas dari pembaca bumiputera, serta mendapat dukungan dari tokoh-tokoh pers Indonesia dan Indo-Arab. Sebaliknya, sikap kritis *Sin Tit Po* juga memicu ketegangan dengan surat kabar dan kelompok pers yang lebih dekat dengan pemerintah kolonial, termasuk media yang berkaitan dengan elite *peranakan* Tionghoa pendukung CHH. Polemik ini menunjukkan bahwa pers Tionghoa tidak selalu berada pada garis politik yang sama, melainkan turut menjadi ruang perdebatan arus politik.

Di sisi lain, meskipun *Sin Po* sering dipahami memiliki kecenderungan nasionalisme Tionghok, surat kabar ini tetap memainkan peran penting dalam membuka ruang aspirasi politik bagi masyarakat Tionghoa dan memuat berita mengenai pergerakan nasional di Hindia Belanda. Bagi sebagian Tionghoa *peranakan* yang lahir dan tumbuh di Hindia Belanda, orientasi politik yang sepenuhnya mengarah ke Tionghok mulai dipandang kurang relevan karena dianggap menjauhkan mereka dari realitas sosial dan politik tempat mereka hidup. Dari kondisi inilah kemudian berkembang gagasan bahwa nasionalisme Tionghoa tidak harus bersifat *chauvinistik*.²

Perubahan cara pandang tersebut melahirkan gagasan *Indonesierschap*, yaitu kesadaran bahwa masyarakat Tionghoa *peranakan* merupakan bagian dari bangsa Indonesia secara politik. Gagasan ini disebarluaskan oleh Liem Koen Hian melalui berbagai surat kabar Melayu-Tionghoa, seperti *Sin Tit Po*, *Soeara Publiek*, dan *Pewartar Soerabaia*. Melalui media tersebut, disampaikan pandangan bahwa etnis Tionghoa *peranakan* memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, dinamika pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memiliki rasa kepedulian dan semangat kebangsaan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Meskipun di sisi lain terdapat pemikiran politik yang berlawanan, hal ini membuat konstestasi politik pada masa pergerakan nasional semakin kompleks. Dengan adanya pers Tionghoa, membuktikan bahwa orang etnis Tionghoa terlibat langsung dalam dinamika politik kolonial.

Penelitian mengenai pers Tionghoa pada pergerakan nasional telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Pertama, yaitu artikel jurnal karya Ririn Darini tahun 2008 yang berjudul *Nasionalisme Etnis Tionghoa di*

² Sikap fanatisme atau keyakinan yang bersifat tidak rasional, yang menganggap kelompok, bangsa, atau diri sendiri jauh lebih unggul dibandingkan pihak lain.

Indonesia. Penelitian ini membahas tentang awal berkembangnya nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia pada masa kolonial yang tumbuh akibat pengaruh nasionalisme di Tiongkok, terutama setelah runtuhnya Dinasti Manchu serta adanya perlakuan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Tionghoa. Penelitian ini menjelaskan terdapat penggolongan dalam perkembangan nasionalisme etnis Tionghoa, yaitu Nasionalisme Tiongkok yang diwakili oleh *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) dan pers *Sin Po*, Nasionalisme Hindia Belanda yang diwakili oleh organisasi *Chung Hwa Hui* (CHH), dan Nasionalisme Indonesia yang diwakili oleh PTI (Partai Tionghoa Indonesia). Pada penelitiannya, Ririn Darini lebih menekankan perkembangan nasionalisme etnis Tionghoa secara umum dalam bidang organisasi, pendidikan, dan politik.

Kedua, yaitu artikel jurnal Jayusmana & Fachrurozi tahun 2021 yang berjudul *Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers di Hindia Belanda Tahun 1869-1942*. Penelitian ini membahas tentang keterlibatan kaum Tionghoa dalam perkembangan pers di Hindia Belanda sejak awal kemunculannya hingga masa pergerakan nasional, yang mana dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi sehingga pers Tionghoa berperan sebagai media komunikasi dan aktivitas bisnis masyarakat Tionghoa. Lebih lanjut, penelitian ini juga menjelaskan adanya orientasi politik yang beragam pada pers Tionghoa, yaitu pro-Tionghoa, pro-Indonesia, dan pro-Belanda dengan pembahasan yang lebih umum dalam mengungkapkan eksistensi dan perkembangan pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional.

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Andi Anang Firmansyah tahun 2015 di Universitas Negeri Jakarta pada Jurusan Sejarah yang berjudul *Surat Kabar Sin Po 1910-1926: Pergulatan Mempertahankan Identitas Tionghoa*. Skripsi ini membahas perkembangan dan pergerakan surat kabar *Sin Po* dalam pergolakan politik di Hindia Belanda, yang memiliki peran penting dalam pergerakan etnis Tionghoa dan mendorong munculnya kesadaran nasional serta berani dalam menentang dan mengkritisi kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda. Atas sikap tersebut, surat kabar *Sin Po* mampu

mendapatkan dukungan dan relasi dari organisasi pergerakan dari kaum Bumiputera maupun pers Tionghoa lainnya yang selaras dengan perjuangan untuk melawan penindasan dari pemerintah kolonial. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada sikap politik *Sin Po* sebagai pers nasionalis Tionghoa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang membahas tentang dinamika orientasi politik pers Tionghoa serta bentuk perdebatan yang terjadi diantara ketiganya belum ada, sebagian besar hanya mengkajinya secara umum. Perbedaan penelitian saya dengan yang lain adalah penelitian ini tidak hanya mengkaji satu media tertentu, tetapi mengomparasikan tiga orientasi politik pers Tionghoa, yaitu pro-Tiongkok, pro-Belanda, dan pro-Indonesia secara bersamaan dalam rentang tahun 1910-1942. Selain itu, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika, pertentangan, dan bentuk polemik antar surat kabar pada masa pergerakan nasional, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pers Tionghoa menjadi arena perdebatan ideologi dan negosiasi identitas politik komunitas Tionghoa di Hindia Belanda.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian sejarah pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara ilmiah dan terarah. Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya *Metodologi Sejarah*, penelitian sejarah hendaknya memiliki batasan masalah yang jelas sehingga pembahasannya menjadi lebih terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini penulis rumuskan dalam tiga batasan, yaitu batasan temporal, batasan spasial, dan batasan tematis.

Batasan temporal dalam penelitian ini mencakup rentang waktu antara tahun 1910 hingga 1942. Tahun 1910 dipilih karena periode ini menandai mulai berkembangnya surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu dan mulai terlihat perbedaan orientasi politik dalam pers Tionghoa,

terutama melalui media seperti *Sin Po*, *Sin Tit Po*, kelompok Chung Hwa Hui yang terlihat gagasannya pada surat kabar *Perniagaan/Siang Po* serta *Pelita Tionghoa*. Sementara itu, tahun 1942 menjadi batas akhir penelitian karena pada masa tersebut Jepang mulai menguasai Indonesia sehingga banyak surat kabar Tionghoa yang dibatasi, dibredel, atau berubah haluan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kontestasi pers Tionghoa dalam dinamika politik Tionghoa-Indonesia pada masa pergerakan nasional.

Secara spasial, penelitian ini difokuskan pada wilayah Jawa, dengan memusatkannya pada Batavia, Semarang, dan Surabaya. Hal ini karena Jawa merupakan pusat perkembangan politik dan budaya etnis Tionghoa. Sedangkan Batavia dan Surabaya merupakan pusat penerbitan surat kabar Tionghoa terbesar pada masa pergerakan nasional, yaitu *Sin Po* (Batavia), *Sin Tit Po* (Surabaya), *Siang Po* (Batavia), dan *Pelita Tionghoa* (Batavia). Selain itu, Semarang juga menjadi lokasi perkumpulan *peranakan* Tionghoa untuk membicarakan masalah Tionghoa. Meskipun demikian, pengaruh dari terbitnya surat kabar tersebut tidak hanya terbatas pada wilayah penerbitannya, melainkan turut dirasakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh Hindia Belanda.

Batasan tematis dalam penelitian ini mengacu pada surat kabar yang digunakan untuk menganalisis orientasi politik pers Tionghoa, yaitu *Sin Po*, *Sin Tit Po*, *Perniagaan/Siang Po*, dan *Pelita Tionghoa*. Pemilihan keempat surat kabar tersebut didasarkan pada perbedaan orientasi politik yang diwakilinya, yakni *Sin Po* yang berorientasi pada nasionalis Tiongkok, *Sin Tit Po* yang mewakili orientasi politik pergerakan nasional Indonesia, serta *Perniagaan/Siang Po* dan *Pelita Tionghoa* yang cenderung berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda. Melalui penggunaan keempat surat kabar tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika orientasi politik pers Tionghoa-Indonesia pada masa Pergerakan Nasional.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi sosial politik dan kemunculan pers Tionghoa pada awal abad ke-20 di Jawa?
2. Mengapa muncul berbagai orientasi politik dalam pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional (1920-1930) di Jawa?
3. Bagaimana dinamika perdebatan tiga arah orientasi politik dalam pers Tionghoa di Jawa (1930-1942) dan hubungannya dengan pergerakan Nasional?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika orientasi politik yang berkembang dalam pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional di Hindia Belanda pada periode 1910-1942, dengan menganalisis bentuk-bentuk perdebatan dan konflik yang terjadi dalam pemberitaan dan sikap redaksional pers Tionghoa.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian sejarah pers dan sejarah sosial-politik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik etnis Tionghoa pada masa kolonial. Dengan mengkaji orientasi politik pers Tionghoa secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bahwa media khususnya surat kabar dapat menjadi menjadi ruang negosiasi politik, arena pembentukan identitas, serta wadah perdebatan ideologis dalam komunitas Tionghoa.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bagi masyarakat Indonesia masa kini mengenai pentingnya peran media dalam membentuk persepsi politik dan identitas sosial, khususnya dalam masyarakat multietnis.

Pemahaman mengenai dinamika orientasi politik dalam pers Tionghoa dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kelompok minoritas berupaya memposisikan diri di tengah perubahan politik yang cepat dan kompleks. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi peneliti lain, pendidik, serta mahasiswa yang ingin mendalami lebih jauh sejarah pers, sejarah komunitas Tionghoa, maupun interaksi sosial-politik pada masa pergerakan nasional.

D. Kerangka Analisis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yaitu Teori Wacana dari Michele Foucault dan Teori *Imagined Communities* dari Benedict Anderson. Kedua teori tersebut bertujuan untuk menghasilkan tulisan yang analitis dan terstruktur sehingga penelitian ini dapat terfokus dan terarah serta mampu menjawab permasalahan penelitian.

1. Teori Wacana oleh Michel Foucault

Pada penelitian ini, pers Tionghoa merupakan media yang menunjukkan adanya realitas politik yang merujuk pada praktik wacana dengan membentuk realitas, makna, dan mempertentangkan orientasi politik dibawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Pemahaman tersebut mengacu pada konsep wacana Michel Foucault sebagaimana dikemukakan dalam bukunya *Arkeologi Pengetahuan*.

Istilah wacana pertama kali diperkenalkan oleh Althusser dan Michele Foucault. Menurut Foucault, wacana dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang berperan dalam mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap strukturalisme Claude Lévi-Strauss yang didasarkan pada dua hal penting. Pertama, bahasa tidak memiliki aturan yang bersifat universal karena bersifat plural atau beragam. Kedua, penggunaan bahasa tidak terlepas dari peran kekuasaan yang turut menentukan makna dan praktik kebahasaan. Foucault memandang bahasa sebagai suatu sistem

pemikiran dan gagasan yang saling berkaitan serta membentuk pengetahuan manusia. Oleh karena itu, wacana menjadi konsep yang penting dalam memahami suatu realitas. Keberagaman cara berpikir dan cara menyatakan sesuatu menyebabkan wacana tidak bersifat tunggal melainkan plural atau memiliki berbagai perspektif. Kondisi tersebut kemudian melahirkan perbedaan kepentingan dan relasi kekuasaan dalam pembentukan wacana, sekaligus membentuk individu melalui wacana-wacana dominan yang berkembang dalam masyarakat dan zamannya. (Ramah et al., 2019) Foucault juga menegaskan bahwa *“istilah wacana dapat didefinisikan sebagai kumpulan pernyataan yang termasuk dalam formasi tertentu...”* (Foucault, 1972)

Menurut konsep wacana Foucault, surat kabar Tionghoa tidak hanya mencerminkan situasi kolonial Hindia Belanda, tetapi juga menjadi arena pembentukan dan pertarungan berbagai wacana mengenai identitas Tionghoa. Wacana tersebut dipengaruhi oleh relasi kuasa antara pemerintah kolonial Belanda, perkembangan politik di Tiongkok, organisasi politik Tionghoa, serta praktik redaksional masing-masing surat kabar. Oleh karena itu, orientasi politik pers Tionghoa tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tetap ataupun dibentuk oleh satu aktor saja, melainkan sebagai hasil dari interaksi berbagai relasi kuasa yang berlangsung secara dinamis.

2. Teori *Imagine Communities* oleh Benedict Anderson

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori nasionalisme dari Benedict Anderson yang dikenal dengan konsep *imagined communities*. Anderson menjelaskan konsep bangsa sebagai: *“an imagined political community—and imagined as both inherently limited and sovereign”*, yaitu komunitas politik yang dapat dibayangkan (*imagined*) karena para anggotanya tidak mungkin saling mengenal secara langsung, namun memiliki kesadaran kolektif sebagai satu komunitas, dalam hal ini yaitu komunitas Tionghoa (Anderson, 2006).

Anderson menjelaskan nasionalisme dapat terbentuk dengan adanya solidaritas sosial yang bersifat horizontal sehingga seseorang dapat merasa memiliki ikatan kebersamaan dengan anggota bangsa lainnya, meskipun berbeda latar sosial atau tidak pernah bertemu secara langsung. Menurut Anderson, perkembangan nasionalisme modern sangat dipengaruhi oleh adanya *print capitalism* atau kapitalisme cetak, yaitu adanya perkembangan teknologi percetakan sehingga dapat menghasilkan produksi buku dan surat kabar. Kemunculan surat kabar dapat membentuk pengalaman simultaneitas sosial, yaitu kesadaran bahwa banyak individu membaca informasi yang sama pada waktu yang sama, sehingga memperkuat imajinasi tentang komunitas yang lebih besar (Anderson, 2006). Dalam hal ini, surat kabar Tionghoa tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, melainkan juga membentuk cara pandang politik pembacanya mengenai identitas Tionghoa. Oleh karena itu, dalam pemberitaannya, pers Tionghoa dapat mempertemukan beragam gagasan dan membentuk solidaritas kelompok, sekaligus menjadi arena pertentangan ideologi politik sehingga memicu adanya kecenderungan pihak komunitas yang mendukung nasionalisme Indonesia, nasionalisme Cina, dan sikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial.

E. Metode Dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah digunakan untuk menelusuri, merekonstruksi, dan menganalisis dinamika orientasi politik pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional antara tahun 1910 hingga 1942. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengungkap dinamika perubahan orientasi politik pers Tionghoa dalam merespons situasi kolonial dan pergerakan nasional. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah dilakukan melalui lima tahapan utama (Kuntowijoyo, 2018), yaitu :

1. Metode Penelitian

a. Pemilihan Topik

Tahap pemilihan topik merupakan tahap awal dan menjadi langkah penting dalam penelitian sejarah. Pemilihan topik dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan emosional dan intelektual. Pemilihan topik yang didasarkan pada kedekatan emosional karena rasa ketertarikan penulis untuk memahami secara mendalam terhadap keterlibatan etnis Tionghoa dalam perjuangan nasional Indonesia. Perjuangan masa pergerakan nasional seringkali hanya membicarakan tentang perjuangan kaum bumiputera pada tulisan-tulisan mereka yang radikal dan diterbitkan dalam media pers. Namun, sebagai kelompok minoritas yang kerap dipandang semata-mata hanya karena dominasi mereka dalam bidang ekonomi, etnis Tionghoa pada kenyataannya memainkan peran penting dalam bidang politik, sebagaimana yang tercermin dengan adanya pers Tionghoa yang menjadi wadah untuk aspirasi mereka dan menunjukkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.

Selain itu yang menjadi bahan pertimbangan penulis dalam membahas orientasi politik pers Tionghoa adalah adanya unsur kebaruan dari penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji pers Tionghoa, khususnya yang berfokus pada peran surat kabar *Sin Po* dalam memperjuangkan nasionalisme serta mengidentifikasi adanya tiga orientasi politik pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional. Berangkat dari penelitian tersebut, penulis ingin menggali dan menganalisis secara mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan orientasi politik dalam pers Tionghoa. Selain itu, penulis juga berupaya menelaah bagaimana bentuk perdebatan dan konflik yang terlihat dalam pemberitaan surat kabar Tionghoa dengan

orientasi politik berbeda yang akan penulis fokuskan pada surat kabar *Sin Po*, *Sin Tit Po*, *Pelita Tionghoa*, serta *Siang Po*. Hal ini karena surat kabar tersebut merupakan pers yang sangat berpengaruh pada masa pergerakan nasional dan memperlihatkan bentuk perdebatan yang cukup kompleks.

b. Pengumpulan Sumber

Pada tahap pengumpulan sumber, penulis telah mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup arsip surat kabar Tionghoa *Sin Po*, *Sin Tit Po*, dan *Siang Po* yang diterbitkan dalam rentang tahun 1910-1942 sebagai sumber primer yang penulis dapatkan secara digital pada Repositori Digital khastara perpustakaan nasional yang dapat diakses secara online dan arsip surat kabar dalam bentuk mikrofilm yang tersedia di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Namun, karena keterbatasan sumber yang penulis hadapi serta ditemukan beberapa surat kabar yang sudah tidak utuh lagi atau tidak terbaca tulisannya (meskipun telah terdigitalisasi), membuat penulis memerlukan sumber sekunder dalam menunjang penelitian ini.

Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari karya-karya sejumlah sejarawan dan peneliti yang membahas sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia, antara lain Leo Suryadinata, Ong Hok Ham, Charles Coppel, Victor Purcell, Lea E. Williams, Benny G. Setiono, Twang Peck Yang, Claudine Salmon, dan M. R. Fernando. Di antara berbagai sumber tersebut, karya-karya Leo Suryadinata menjadi rujukan utama karena memberikan pembahasan yang komprehensif mengenai dinamika politik masyarakat Tionghoa, khususnya terkait perkembangan orientasi politik kelompok *Sin Po*, *Chung Hwa Hui* (CHH), dan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada masa pergerakan nasional.

Selain sumber sekunder dalam bentuk buku, penulis juga menggunakan sumber lainnya seperti penelitian yang berjudul *Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia, Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers di Hindia Belanda Tahun 1869-1942* (2021), dan skripsi yang berjudul *Surat Kabar Sin Po 1910-1926: Pergulatan Mempertahankan Identitas Tionghoa* (2015) sebagai referensi dalam penulisan sejarah.

Berbagai sumber buku tersebut, penulis dapatkan dari koleksi buku Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Freedom. Pengumpulan sumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid, mendalam, dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Kritik Sumber / Verifikasi

Tahap kritik sumber (verifikasi) ini dilakukan untuk menilai keabsahan sumber sejarah, baik dari segi autentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (kepercayaan isi sumber). Menurut Kuntowijoyo, verifikasi mencakup dua tahapan, yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar asli dan bukan hasil pemalsuan, sedangkan kritik internal bertujuan untuk menilai apakah isi sumber tersebut dapat dipercaya serta relevan dalam menjawab permasalahan penelitian.

a) Kritik Eksternal

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer berupa surat kabar Tionghoa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1910-1942, yang sebagian besar diperoleh dalam bentuk arsip digital. Oleh karena itu, kritik eksternal dilakukan dengan meneliti identitas dokumen surat kabar demi memastikan keaslian serta validitas sumber. Penulis mencermati informasi yang tercantum pada surat kabar, seperti nama surat kabar, tanggal dan tahun terbit, nomor edisi, serta tempat penerbitan.

Selain itu, penulis juga memperhatikan kualitas cetakan yang terlihat pada hasil pemindaian untuk memastikan bahwa dokumen tersebut autentik dari surat kabar yang terbit pada periode 1910-1942.

Penulis juga menelaah karakteristik fisik dokumen yang masih dapat diamati melalui arsip digital, seperti jenis huruf, gaya penulisan, format halaman, serta bahasa yang digunakan. Surat kabar yang digunakan umumnya masih menggunakan ejaan Melayu lama dan menampilkan aksara Tionghoa pada bagian judul. Pada beberapa edisi, seperti *Pelita Tionghoa*, juga ditemukan penggunaan bahasa Belanda dalam sebagian isi pemberitaannya. Selain itu, penulis memperhatikan konsistensi jenis huruf dan tata letak halaman pada edisi-edisi yang dijadikan sumber penelitian. Berdasarkan pengamatan tersebut, tidak ditemukan perubahan yang mencolok sehingga mendukung autentisitas arsip yang digunakan.

b) Kritik Internal

Setelah penulis memastikan ke-autentikan sumber sejarah, langkah selanjutnya adalah kritik internal untuk menilai kredibilitas isi surat kabar. Pada tahapan ini, penulis mencermati apakah berita yang dimuat mengandung unsur subjektivitas redaksi, bias ideologis, propaganda, atau kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, penulis juga akan membandingkan sumber yang satu dan sumber lainnya seperti antar surat kabar yang berbeda orientasi politiknya maupun dengan sumber sekunder seperti buku dan penelitian terdahulu.

d. Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis atau penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang ditemukan, kemudian menyusunnya menjadi suatu sintesis yang logis dan koheren. Menurut Kuntowijoyo, interpretasi terbagi menjadi

dua macam, yaitu Analisis (menguraikan) dan Sintetis (menyatukan) (Kuntowijoyo, 2018). Pada tahap analisis, penulis menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber pers Tionghoa untuk melihat bagaimana orientasi politik tersebut terbentuk dan berkembang, termasuk polemik yang terjadi dalam pemberitaan pers Tionghoa, serta menganalisis pengaruh pers Tionghoa terhadap dinamika sosial-politik komunitas Tionghoa pada periode tersebut. Selain penafsiran pada data sejarah yang telah ditemukan, proses interpretasi dalam penelitian ini juga merujuk pada teori wacanaa Michel Foucault untuk menganalisis pertentangan wacana dalam pers dan teori *Imagined Communities* dari Bennedict Anderson untuk melihat peran pers dalam membentuk identitas dan kesadaran nasionalisme komunitas Tionghoa pada masa pergerakan nasional.

e. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Pada tahap ini, hasil penelitian disusun dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, kronologis, dan analitis. Penulisan dilakukan dengan menggabungkan data empiris dan interpretasi teoritis untuk merekonstruksi dinamika orientasi politik pers Tionghoa serta kontribusinya dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

2. Bahan Sumber

a. Sumber Primer :

- Pers Tionghoa dari beberapa surat kabar seperti Sin Po, Siang Po/Perniagaan, Pelita Tionghoa, dan Sin Tit Po yang memuat pemberitaan mengenai aktivitas politik dan sosial etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional.
- Arsip kolonial Hindia Belanda, termasuk laporan resmi pemerintah mengenai organisasi atau pers Tionghoa dan gerakan politiknya.

b. Sumber Sekunder :

- Buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas sejarah politik etnis Tionghoa di Indonesia, seperti karya Leo Suryadinata, Ong Hok Ham, dan Benny G. Setiono.
- Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema nasionalisme Tionghoa dan sejarah pergerakan nasional.

